

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang memiliki tuntutan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mesti dapat mengembangkan dan memperbaharui standar akuntansi yang dijalankan dalam roda pemerintahan serta dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Terbitnya aturan mengenai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan kebijakan reformasi keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada pemerintah maupun daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *good governance*. Upaya yang harus dilakukan dan diciptakan adalah standar administrasi moneter. Untuk memiliki pilihan untuk membuat standar administrasi moneter yang baik, penting untuk memperkuat kerangka kerja dan organisasi mengingat peraturan dan pedoman dan prinsip-prinsip terkait untuk memperkenalkan laporan anggaran.

Standar administrasi moneter yang baik akan mempengaruhi penyajian otoritas publik yang menyajikan atau membuat laporan moneter. Pengenalan ringkasan fiskal yang baik tergantung pada pengungkapan tanggung jawab yang mengajukan dan menawarkan ekspresi moneter. “Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012)”.

Implementasi dari standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang maksimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan membuat penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat lebih optimal.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan misi dari instansi dalam bentuk aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawab instansi kepada pihak pemangku kepentingan yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Peningkatan kinerja instansi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi misi dan strategi instansi

pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Laporan keuangan yang dilaporkan dari masing-masing lembaga atau instansi pemerintah akan memperhatikan gambaran kondisi keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan informasi laporan keuangan yang dilaporkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terdiri dari kelompok instansi pemerintah yang ada di daerah yang salah satunya yaitu Dinas Pariwisata.

Pariwisata didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin, yang merupakan kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah berupaya untuk merencanakan, mengembangkan, mengembangkan dan mengevaluasi, kemudian mengakumulasi dalam bentuk program dan kegiatan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas untuk melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, dan juga tugas perbantuan. Tugas ini yang pada dasarnya yaitu manifestasi fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata juga menyusun laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan untuk memberikan penggambaran dan penatausahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi.

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kualitas laporan keuangan bagi teknis akuntabilitas kinerja pariwisata di Kota Padang. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang?
2. Apakah kualitas laporan keuangan yang digunakan pada Dinas Pariwisata Kota Padang telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

1.3 Tujuan Magang

1. Agar mengetahui bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang
2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang digunakan pada Dinas Pariwisata Kota Padang telah terlaksana dengan baik yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1.4 Manfaat Magang

1. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata
2. Memberikan pengalaman kerja dan praktek lapangan bagi mahasiswa
3. Memiliki kesempatan untuk dapat mengaplikasikan semua ilmu yang dipelajari selama kuliah secara langsung

1.5 Metode Magang

1. Studi Keperpustakaan

Memperoleh informasi dengan mencari, mengumpulkan dan mendapatkan berbagai referensi bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

2. Studi Lapangan

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari observasi dan wawancara dengan pejabat atau karyawan pada instansi terkait.

b. Data Sekunder

Data yang memuat berupa laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan diperoleh dari instansi terkait.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Untuk menjalankan kegiatan magang penulis menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan magang selama 40 hari kerja yang terhitung dimulai pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam perumusan masalah, penulis melihat bahwa kualitas laporan keuangan pada kinerja akuntabilitas pada Dinas Pariwisata harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar pada saat melakukan pencatatan laporan keuangan tidak terjadi salah saji dan menghindari kesalahan yang fatal pada Dinas Pariwisata Kota Padang, serta bagaimana pengaruh dari kualitas laporan keuangan tersebut terhadap kinerja akuntabilitas dari Dinas Pariwisata Kota Padang.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari delapan sub bab yang menjelaskan dan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini membahas tentang pengertian, pembahasan, serta tujuan aspek yang ada, serta jawaban sementara dari semua rumusan masalah yang telah dijabarkan melalui latar belakang masalah dari tujuan proposal magang ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini memberikan mengenai profil lembaga atau instansi yang meliputi latar belakang dari Dinas Pariwisata Kota Padang, tujuan adanya Dinas Pariwisata Kota Padang, lokasi, status serta struktur dari instansi tersebut.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai uraian lebih lanjut dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang yang menjelaskan tentang “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang”.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis-analisis dan pembahasan masalah serta saran yang dianggap penting sebagai bahan dasar pertimbangan untuk perubahan dan perbaikan dilain waktu dan sebagai penambah masukan untuk lebih baik lagi kedepannya.

